

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan menuju sistem digital dalam administrasi perpajakan merupakan bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan, memperkuat transparansi, meningkatkan ketepatan data, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Kemajuan teknologi informasi mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bertahap, dari metode konvensional menuju sistem digital yang saling terintegrasi. Reformasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform digital (Djp, 2025).

Salah satu bentuk implementasi digitalisasi administrasi perpajakan adalah pengembangan sistem teknologi informasi perpajakan yang terintegrasi. Transformasi digital administrasi perpajakan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) merupakan inovasi strategis untuk mengoptimalkan efisiensi biaya kepatuhan perpajakan, sekaligus menjadi paradigma fundamental dalam modernisasi sistem fiskal di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dengan desain *quasi-experimental difference-in-difference* pada 384 wajib pajak menengah di Jakarta Selatan periode 2019–2024, implementasi sistem Coretax terbukti berpengaruh signifikan terhadap penurunan biaya kepatuhan

pajak sebesar 31,8% dibandingkan periode sebelum implementasi. Temuan tersebut mengonfirmasi efektivitas strategi digitalisasi dalam mencapai dua tujuan sekaligus, yakni peningkatan kepatuhan dan efisiensi administrative (Nugraha, 2025).

Dalam kerangka sistem Coretax tersebut, salah satu fitur yang mendukung proses administrasi perpajakan adalah E-Bupot Unifikasi. Bukti potong unifikasi kini dapat dibuat melalui menu E-Bupot Unifikasi pada aplikasi Coretax, sehingga wajib pajak tidak perlu menggunakan aplikasi terpisah. E-Bupot Unifikasi merupakan aplikasi elektronik yang digunakan untuk membuat bukti pemotongan sekaligus melaporkan SPT Masa PPh secara elektronik. Sistem ini mencakup PPh Pasal 23/26, Pasal 4 Ayat 2, Pasal 15, dan Pasal 22, sehingga beberapa jenis pajak dapat dikelola melalui satu aplikasi yang terintegrasi. Penerapan E-Bupot Unifikasi terbukti membawa efisiensi dalam pengelolaan pajak karena mempermudah proses pelaporan secara elektronik, mengurangi kecurangan, serta meningkatkan akurasi pelaporan, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sustrisni et al., 2023).

Salah satu jenis pajak yang menggunakan E-Bupot Unifikasi adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu seperti jasa, dividen, royalti, hadiah, dan sewa selain tanah dan bangunan. Dalam pelaksanaannya, pihak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak wajib melakukan

penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, implementasi E-Bupot Unifikasi berbasis Coretax menjadi aspek penting dalam mendukung administrasi perpajakan perusahaan agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat (Novianty et al., 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan E-Bupot mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mempermudah proses pelaporan pajak. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penggunaan E-Bupot dalam sistem DJP Online sebelum diterapkannya *Coretax Administration System* secara penuh. Penelitian yang mengkaji implementasi E-Bupot Unifikasi berbasis Coretax, khususnya pada perusahaan manufaktur, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi E-Bupot Unifikasi berbasis Coretax menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran mengenai pelaksanaannya dalam praktik perpajakan Perusahaan (Gunawan et al., 2023).

PT Karya Machindo Industries merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi mesin berdasarkan gambar teknik yang disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Perusahaan telah resmi berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 05 April 2013 dengan nomor pengukuhan 10194/WPJ.22/KP.1203/2008 sehingga memiliki kewajiban untuk

melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan menggunakan berbagai jasa dari pihak ketiga, seperti jasa teknik, dan jasa konsultan yang termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23. Seiring dengan adanya transformasi digital perpajakan dan penerapan *Coretax Administration System*, PT Karya Machindo Industries juga melakukan penyesuaian dengan mengimplementasikan E-Bupot Unifikasi dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23. Penggunaan sistem tersebut memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan karena bukti potong dapat diterbitkan dan diakses secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, implementasi E-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax pada PT Karya Machindo Industries pada dasarnya telah berjalan dengan baik dalam mendukung proses pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala pada tahap pemotongan pajak, yaitu perusahaan beberapa kali tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi pembayaran kepada supplier yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang seharusnya menjadi objek pemotongan. Kondisi ini terjadi antara lain karena ketidakjelasan deskripsi objek transaksi pada invoice dalam membedakan apakah transaksi tersebut merupakan barang atau

jasa, sehingga proses identifikasi objek pemotongan sebelum data diinput ke dalam sistem Coretax berisiko menimbulkan kelalaian pemotongan (*underwithholding*) yang berpotensi dikenai sanksi administrasi apabila ditemukan oleh otoritas pajak di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi e-Bupot Unifikasi berbasis Coretax tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, tetapi juga pada ketepatan proses identifikasi objek pemotongan sebelum data tersebut diinput ke dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax dalam Pemenuhan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Karya Machindo Industries”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi E-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Karya Machindo Industries?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi E-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax dalam Pemenuhan

Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Karya Machindo Industries.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti itu sendiri, entitas, kampus Universitas Harkat Negeri, serta orang yang membutuhkan dengan masalah-masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman mengenai praktik penyusunan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui sistem e-Bupot Unifikasi berbasis CoreTax. Selain itu, penelitian ini menjadi media pembelajaran untuk mengimplementasikan konsep dan teori perpajakan yang diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam praktik langsung di lingkungan perusahaan.

2. Bagi Prodi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Program Studi Diploma III Akuntansi dalam memperkaya bahan ajar dan referensi akademik, khususnya yang berkaitan dengan administrasi perpajakan dan penerapan e-Bupot Unifikasi pada Pajak Penghasilan Pasal 23.

3. Bagi PT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT Karya Machindo Industries dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, khususnya dalam penyusunan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui sistem e-Bupot Unifikasi berbasis Coretax, sehingga kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk menjaga agar pembahasan tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada implementasi penyusunan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa teknik, jasa konsultan, dan sewa. Penyusunan bukti potong tersebut dilakukan melalui sistem e-Bupot Unifikasi berbasis CoreTax dalam administrasi perpajakan. Objek penelitian dibatasi pada PT Karya Machindo Industries sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan penulis, dengan data yang digunakan merupakan data bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 periode bulan Juli sampai dengan November 2025 yang diproses di PT Karya Machindo Industries. Penelitian ini hanya mengkaji prosedur dan tahapan administrasi penyusunan bukti potong PPh Pasal 23. Aspek perhitungan nominal Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dibahas secara

rinci, melainkan menitikberatkan pada penerapan sistem dan aspek administrasi e-Bupot Unifikasi.

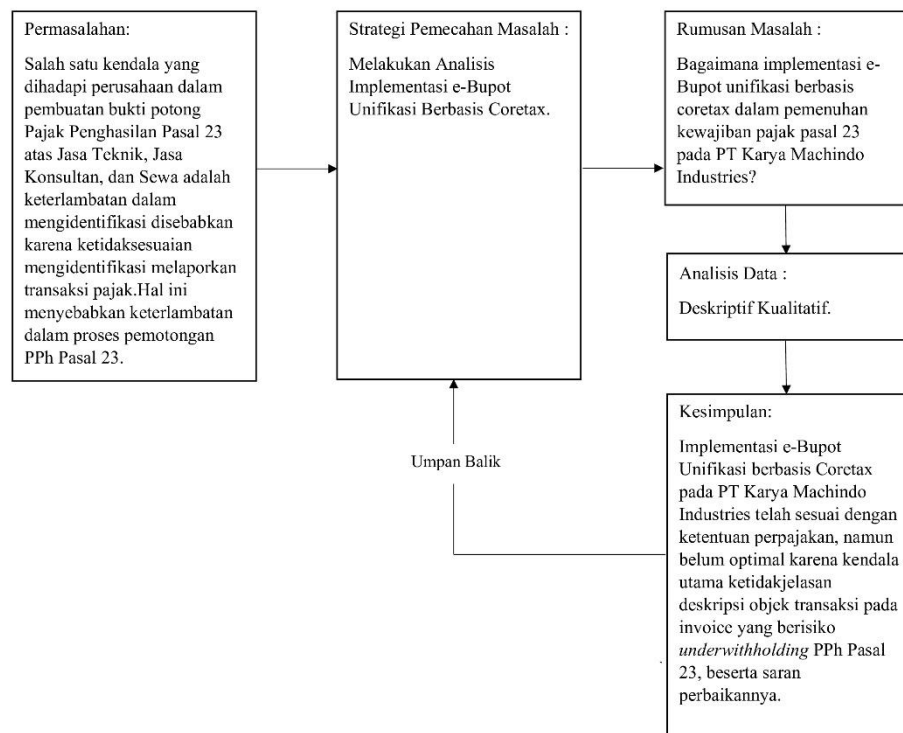
1.6 Kerangka Berpikir

Transformasi digital di bidang perpajakan dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem administrasi pajak agar menjadi lebih efektif dan mudah digunakan oleh wajib pajak. Salah satu bentuk nyata dari transformasi tersebut adalah implementasi e-Bupot Unifikasi PPh Pasal 23 yang terintegrasi dalam sistem Coretax DJP. Sebelum sistem ini diterapkan, proses pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan pelaporan SPT Masa masih dilakukan secara terpisah, sehingga menimbulkan kerumitan administrasi dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan maupun pelaporan pajak.

Dengan diterapkannya e-Bupot Unifikasi, pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih tertib, efisien, dan tepat waktu. Selain itu, sistem ini juga memudahkan pengawasan dan pengelolaan data oleh pihak fiskus karena informasi perpajakan tercatat secara otomatis dan terstruktur.

Implementasi e-Bupot Unifikasi PPh Pasal 23 diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan akurasi data perpajakan, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pada akhirnya, transformasi digital melalui e-Bupot Unifikasi menjadi sarana

pendukung terciptanya sistem perpajakan yang modern, transparan, dan akuntabel.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto atau persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

1. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan singkat atas pustaka yang mendasari dan mendukung. Pokok-pokok bahasan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian yang diambil dan akan dijadikan tinjauan dalam penyusunan tugas akhir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku atau jurnal, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

2. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain kartu konsultasi dan spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.